

## Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Pedesaan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro

Muhammad Marzuqi Chafidzulloh

Program Studi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: [chafidzulloh13@gmail.com](mailto:chafidzulloh13@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 08, 2026

Accepted April 18, 2026

#### Keywords:

Education policy, 12-year compulsory education, rural education, policy implementation, educational participation

### ABSTRACT

The 12-year compulsory education policy is one of the government programs aimed at improving equal access to education and enhancing the quality of human resources in Indonesia. However, the implementation of this policy in rural areas still faces various challenges related to social conditions, economic factors, and public awareness of education. This study aims to analyze the implementation of the 12-year compulsory education policy in Semudikaran Village, Bojonegoro Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was conducted through interviews, observations, documentation, and literature studies related to educational policies and compulsory education programs. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the 12-year compulsory education policy in Semudikaran Village has been carried out through collaboration between local government, educational institutions, and the community. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, such as family economic conditions, low public awareness of education, and social environments that are less supportive of children's educational continuity. Therefore, stronger cooperation between the government, schools, and the community is needed to improve the success of implementing the 12-year compulsory education policy in rural areas.



### Article Info

#### Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 08, 2026

Accepted April 18, 2026

#### Kata kunci:

Kebijakan pendidikan, wajib belajar 12 tahun, pendidikan pedesaan, implementasi kebijakan, partisipasi pendidikan

### ABSTRAK

Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesadaran pendidikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan program wajib belajar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam

meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan.



---

***Corresponding Author:***

Muhammad Marzuqi Chafidzulloh  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro  
Email: [chafidzulloh13@gmail.com](mailto:chafidzulloh13@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, serta kemampuan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan pendidikan, salah satunya melalui program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan hingga jenjang menengah bagi seluruh warga negara.

Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan generasi yang memiliki kompetensi dan daya saing di tengah perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun sangat dipengaruhi oleh kerja sama dan kesiapan berbagai unsur pendidikan di daerah.

Dalam konteks wilayah pedesaan, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kesadaran pendidikan, serta faktor geografis sering kali menjadi hambatan dalam keberlangsungan pendidikan anak. Tidak sedikit anak di wilayah pedesaan yang memilih bekerja membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, akses menuju sekolah menengah yang relatif jauh juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan di beberapa daerah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan optimal apabila tidak disertai dengan dukungan sosial, ekonomi, dan fasilitas yang memadai.

Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial masyarakat yang menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun. Sebagai wilayah pedesaan, masyarakat Desa Semudikaran memiliki

latar belakang ekonomi dan tingkat kesadaran pendidikan yang beragam. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, seperti faktor ekonomi keluarga, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan, serta pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah. Di sisi lain, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan terus berupaya mendorong keberhasilan program wajib belajar melalui berbagai bentuk sosialisasi, bantuan pendidikan, dan pengawasan terhadap peserta didik usia sekolah.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, implementasi program wajib belajar 12 tahun tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan atau program pemerintah semata, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat. Suatu kebijakan pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila mampu diterapkan secara nyata dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, beserta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program wajib belajar, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan partisipasi sekolah di berbagai daerah. Sebagian besar penelitian tersebut menekankan pada pentingnya peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, serta ketersediaan sarana pendidikan menjadi aspek penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan atau pada pembahasan kebijakan pendidikan secara umum tanpa menyoroti kondisi masyarakat pedesaan secara lebih mendalam.

Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan, terutama pada tingkat desa, masih relatif terbatas. Padahal, wilayah pedesaan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan juga menghadapi tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik meneliti implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro sebagai representasi wilayah pedesaan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan kebijakan pendidikan dari sisi pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga melihat bagaimana respons dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 12 tahun di lingkungan pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada masyarakat desa yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang khas.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu dengan mengkaji implementasi kebijakan pendidikan melalui kondisi nyata masyarakat pedesaan serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program

wajib belajar 12 tahun. Selama ini, banyak penelitian tentang kebijakan pendidikan lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dan statistik pendidikan, sedangkan kondisi sosial masyarakat sebagai penerima langsung kebijakan sering kali kurang mendapatkan perhatian secara mendalam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai bagaimana kebijakan wajib belajar 12 tahun diterapkan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, termasuk berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan kesadaran pendidikan masyarakat yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak di wilayah pedesaan.

Kajian literatur mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa program wajib belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa kebijakan wajib belajar tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan wajib belajar 12 tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih kompetitif, memiliki keterampilan, serta mampu menghadapi perkembangan sosial dan ekonomi di era modern. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang terus dikaji dalam berbagai penelitian pendidikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan wajib belajar dari perspektif efektivitas program, pemerataan pendidikan, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan umumnya dipahami sebagai proses pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan berbagai unsur, seperti dinas pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, akses menuju sekolah, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa daerah pedesaan masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan program wajib belajar dibandingkan wilayah perkotaan.

Di sisi lain, kajian mengenai pendidikan di wilayah pedesaan menekankan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Masyarakat pedesaan umumnya menghadapi keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang belum merata, serta rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, faktor budaya dan pola pikir masyarakat juga sering kali memengaruhi keputusan anak untuk tetap bersekolah atau memilih bekerja membantu keluarga. Dalam konteks tersebut, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak hanya membutuhkan dukungan administratif dari pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta pendekatan sosial yang sesuai dengan kondisi wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan di tingkat masyarakat serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hasil survei literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya program wajib belajar 12 tahun, telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian menekankan pada aspek

efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, pemerataan akses pendidikan, serta upaya menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Implementasi kebijakan pendidikan umumnya dipahami sebagai proses pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan berbagai unsur pendidikan, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, guru, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program wajib belajar, seperti kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pemerintah semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan atau pembahasan kebijakan pendidikan dalam lingkup yang lebih umum, sehingga kondisi nyata masyarakat pedesaan sering kali belum dibahas secara mendalam.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di tingkat desa, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. Padahal, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dengan masyarakat perkotaan, sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan juga menghadapi tantangan yang berbeda. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan menengah menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan wajib belajar di lingkungan pedesaan juga masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, beserta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. Secara khusus, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di lingkungan masyarakat desa.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten

Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah serta lembaga pendidikan dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan. Selama ini, kajian mengenai kebijakan wajib belajar lebih banyak menitikberatkan pada aspek pemerataan pendidikan dan efektivitas program pemerintah secara umum, sementara implementasi kebijakan pendidikan pada masyarakat pedesaan dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang khas masih relatif terbatas untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif tambahan dengan menempatkan Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro sebagai fokus kajian dalam memahami implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di lingkungan pedesaan.

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, serta masyarakat dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Melalui penelitian ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih memahami berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di wilayah pedesaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam lingkungan masyarakat desa. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun, seperti masyarakat, pihak sekolah, perangkat desa, serta dinas pendidikan terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pendidikan, arsip pemerintah, dan data statistik pendidikan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta kajian literatur untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro beserta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan.

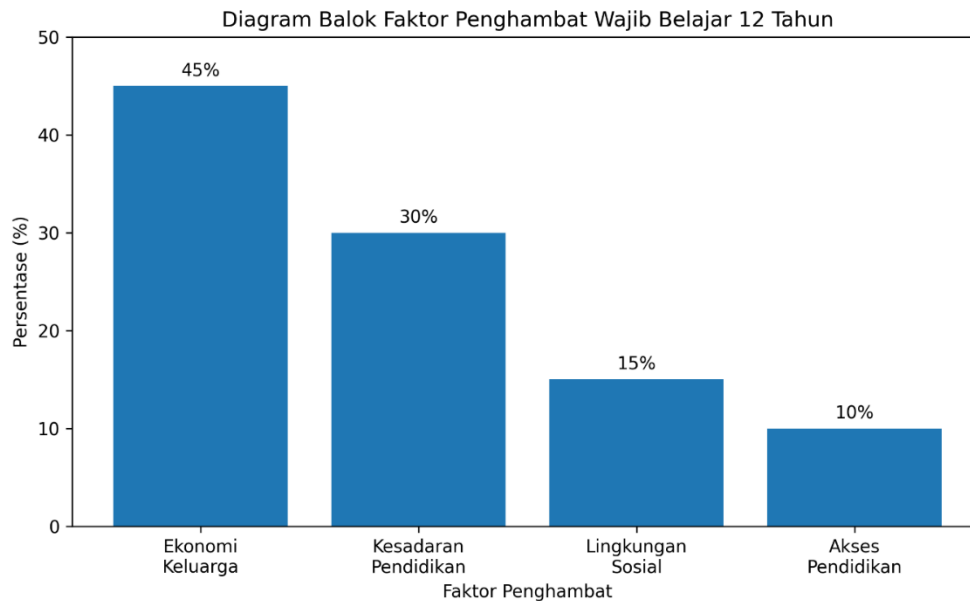
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut telah berjalan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat setempat. Program wajib belajar 12 tahun diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat hingga jenjang sekolah menengah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pihak sekolah telah melakukan berbagai langkah, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, pendataan anak usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah, serta kondisi lingkungan sosial menjadi beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, masih terdapat anak usia sekolah yang memilih bekerja membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan. Program wajib belajar 12 tahun yang diterapkan melalui kerja sama pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah. Dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk dukungan telah dilakukan, seperti sosialisasi pendidikan, pendataan anak usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendorong keberhasilan program wajib belajar di lingkungan pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta adanya anggapan bahwa bekerja lebih penting dibandingkan melanjutkan sekolah juga memengaruhi pelaksanaan program wajib belajar. Di sisi lain, keterbatasan akses dan kondisi lingkungan sosial masyarakat pedesaan turut memberikan dampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan tersebut.



Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program wajib belajar di berbagai daerah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan minimnya dukungan masyarakat dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak hingga jenjang sekolah menengah. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena harus membantu pekerjaan orang tua atau memilih bekerja lebih awal.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan pada aspek adanya pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan. Namun demikian, penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik pada kondisi masyarakat Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas implementasi kebijakan pendidikan secara umum, tetapi juga mengkaji bagaimana peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 12 tahun di lingkungan pedesaan.

Dalam perspektif teori kebijakan pendidikan, implementasi program wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan atau program pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah, lembaga pendidikan, serta dukungan masyarakat dalam menjalankan program pendidikan secara berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan pendidikan, pelaksanaan program wajib belajar seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya menuntut adanya aturan yang jelas, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan, kesadaran masyarakat, serta kondisi ekonomi yang mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Dalam konteks penelitian ini,

implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan. Meskipun program wajib belajar telah diterapkan melalui berbagai bentuk sosialisasi dan bantuan pendidikan, faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial masih menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat pedesaan secara lebih komprehensif agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pendidikan, pendataan anak usia sekolah, pemberian bantuan pendidikan, serta pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan peserta didik. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat hingga jenjang sekolah menengah. Dengan demikian, tujuan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk memperluas akses pendidikan masyarakat pedesaan telah mulai dijalankan di lingkungan Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilannya. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak hanya bergantung pada keberadaan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial, ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Hasil penelitian ini sekaligus menjawab tujuan penelitian yang telah diuraikan dalam pendahuluan, yaitu untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih optimal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pendidikan, pendataan anak usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat hingga jenjang sekolah menengah di wilayah pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilan

pelaksanaannya. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kondisi lingkungan sosial, serta keterbatasan akses pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan, bantuan pendidikan, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat desa. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kerja sama tersebut, tujuan kebijakan wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata di wilayah pedesaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan restu yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para masyarakat yang berkenan untuk diajak wawancara serta dosen pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada berbagai inspirasi dan hiburan yang menemani proses penyusunan artikel ini, di antaranya Suka Sukarol Munsyid, Muhasabtul Qolbi, Niken Salindri, serta Spotify dan iklannya. Ucapan terima kasih khusus juga penulis sampaikan kepada *caffé AD* dekat puskesmas Ngumpakdalem serta perpustakaan dan kearsipan kabupaten Bojonegoro yang telah menjadi tempat penuh kenyamanan dalam menyusun tulisan ini. Semoga segala dukungan, baik berupa ilmu, doa, maupun semangat, mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Swt.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., and Siti Rahmawati. "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 112–125.
- Ahmadi, Rizki. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 77–89.
- Arifin, Zainal, and Nurul Hidayah. "Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 6, no. 3 (2024): 201–214.
- Fadilah, Rina. "Kesadaran Pendidikan Masyarakat Desa terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 98–109.

- Hakim, Ahmad, and Dwi Setyowati. “Efektivitas Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun dalam Pemerataan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Nusantara* 7, no. 1 (2025): 55–68.
- Hamzah, M. Ali. “Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Upaya Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan* 5, no. 4 (2024): 176–189.
- Hidayat, Arif, and Luluk Fauziah. “Dinamika Pendidikan Anak di Lingkungan Pedesaan Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah* 4, no. 3 (2024): 144–158.
- Kurniawan, Dedi. “Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak di Desa.” *Jurnal Sosial dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 131–145.
- Mulyadi, Agus, and Rina Oktaviani. “Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Daerah Terpencil dan Pedesaan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 88–101.
- Prasetyo, Bagus. “Peran Lingkungan Sosial dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun.” *Jurnal Pendidikan Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 211–223.
- Rahman, Abdul, and Fitriani Nur. “Analisis Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 2 (2025): 166–180.
- “Salah Satu Wujud Penelitian,” n.d.
- Sari, Dewi Kartika, and Imam Syafi’i. “Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan di Wilayah Pedesaan.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 7, no. 3 (2024): 119–132.
- Wibowo, Andi, and M. Fajar Ramadhan. “Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Pedesaan.” *Jurnal Kajian Pendidikan Nasional* 4, no. 2 (2025): 92–107.